

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 1998 kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan yang hal ini disebut era reformasi. Salah satu perubahan yang sangat nampak adalah di bidang politik dimana selama pemerintahan orde baru semua elemen masyarakat dikendalikan oleh pemerintah yang otoriter. Menurut Roger F. Saltou (Dalam Ebyhara,2016: 40) menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Memang prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis adalah tiap warga negara ikut aktif dalam proses politik. Salah satu bentuk perubahan hasil reformasi adalah adanya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai 2002. Dampak amandemen tersebut mempengaruhi kebebasan dalam berpolitik, salah satu wujud perubahannya yakni banyak partai politik yang bermunculan yang selama masa orde baru dibungkam. Bahkan ada yang memberanikan diri untuk mendirikan partai baru baik berideologi agama maupun nasionalis.

Banyaknya partai-partai yang baru lahir di era reformasi mempengaruhi adanya pemilihan umum pertama yang diselenggarakan setelah reformasi. Pada

pemilu tahun 1999 ada peningkatan daripada pemilu sebelumnya yakni pada era orde baru, yang mana pada masa orde baru hanya terdapat dua partai politik (PDI dan PPP) dan serta satu golongan karya (Golkar) dan pada tahun 1999 pelaksanaan pemilihan umum diikuti oleh 26 partai politik, baik partai politik lama maupun yang baru. Memang prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis adalah tiap warga negara ikut aktif dalam proses politik. Namun, Almond dan Verba (Dalam Aribowo,dkk,1996:69) mengingatkan bahwa kalau tiap warga negara ikut serta dalam tiap proses politik, demokrasi justru tidak akan berjalan.

Kehidupan politik yang ada di Indonesia sangat dinamis dan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang demokrasi, maka partai politik menjadi sarana penting dalam pelaksanaan demokrasi yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Budiardjo (2002:161) bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum. Sedangkan pengertian partai politik menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Republik Indonesia menyatakan bahwa "Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan dan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum".

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik biasanya melaksanakan empat fungsi. *Pertama*, sebagai sarana komunikasi; *kedua*, sarana sosialisasi politik; *ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik; dan *keempat*, partai

politik sebagai sarana pengatur konflik (Miriam Budiarjo, 1980, 1981: 163-164). Dari keempat fungsi tersebut maka, peran yang paling mendasar dari partai politik adalah mengarah ada formulasi dan implementasi dari kebijakan publik yang akan mengatur masyarakat. Serta mengorganisasikan warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan dalam fungsi partai politik dalam Undang-Undang menyatakan BAB 5 pasal 10 No. 02 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Partai Politik menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana. berbunyi :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi perstuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
4. Ekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Dari keempat fungsi partai politik diatas, fungsi yang paling substansial dalam partai politik yang pertama adalah memberikan pendidikan terhadap anggota dan masyarakat agar mempunyai kesadaran dalam berdemokrasi. kedua, membuat kebijakan yang berorientasi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menjadi penting dan strategis bagi partai politik dalam memberikan pendidikan politik dalam meningkatkan pengetahuan tentang politik dan ada rasa partisipatif yang kritis dalam pelaksanaan demokrasi (pemilu). Menurut (Prihatmoko, 2003: 74) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya,

dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia non formal oleh partai politik, media masa, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pendidikan politik menjadi sarana penting, karena dalam pembangunan terhadap sebuah negara membutuhkan pendidikan kepada masyarakat dari segi politik. Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan mandiri dalam berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam membangun bangsa. Kehadiran partai politik dapat dilihat perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran aktif dalam pelaksanaan sistem politik dan sekaligus memberikan kritik dan koreksi.

Berapa pertimbangan yang menjadi latar belakang memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Buleleng sebagai berikut :*pertama*, Partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis partai islam bisa berkembang di daerah yang minoritas masyarakatnya beragama islam. *Kedua*, pada pemilihan umum tahun 2014 di kabupaten Buleleng tidak mendapatkan kursi di legislatif dan pada tahun 2019 mendapatkan satu kursi legislatif. Meskipun yang mendominasi partai berideologi nasional tidak menutup kemungkinan partai yang berideologi agama khususnya partai islam juga bisa menduduki kursi legislatif. *Ketiga*, meskipun ada sebagian partai yang berbasis islam seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan namun Partai Kebangkitan Bangsa yang berada di kursi legislatif pada periode 2019-2024 ini. Adapun perolehan kursi DPRD Buleleng periode 2019-2024 yakni, PDIP dari 15 kursi menjadi 18 kursi, Golkar tetap sebanyak 7 kursi, Hanura menurun dari 6 menjadi 5 kursi,

Gerindra dari 6 turun menjadi 5, Nasdem meningkat dari 4 kursi menjadi 5 kursi, perindo 1 kursi, Demokrat turun dari 6 kursi menjadi 3 kursi, dan PKB pada periode 2014-2019 tidak memiliki kursi di legislatif namun pada periode 2019-2024 mendapatkan 1 kursi (Balipuspanews.com:2019).

Dalam melakukan upaya pendidikan politik yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa bukan hanya berorientasi pada muatan politik saja, melainkan melalui materi keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial yang dimaksud ialah melakukan kegiatan serasehan dengan tokoh masyarakat baik dalam lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan maupun secara pendekatan pribadi. Secara tidak langsung dalam kegiatan sosial tersebut melatih adanya partisipasi oleh pemilih dan untuk kader sendiri. Sehingga dengan melalui kegiatan tersebut Partai Kebangkitan Bangsa bisa mengambil hati masyarakat.

Dalam melaksanakan pendidikan partai politik yakni Partai kebangkitan Bangsa dalam melaksanakan fungsi dan perannya melakukan pendidikan politik terhadap kader maupun masyarakat, ini sangat menarik kiranya jika kita kaji secara mendalam bagaimana cara partai politik melakukan pendidikan politik terhadap kadernya maupun kepada masyarakat. Sehingga peneliti mengambil judul pada penelitian ini yakni *“PERAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN BULELENG DALAM PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP MASYARAKAT”*

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak ikut andil dalam pelaksanaan pemilihan umum.
2. Ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Deewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini pada pendidikan politik ini yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Buleleng. Perlu digarisbawahi, bahwa penelitian ini difokuskan bagaimana peran partai politik dalam melakukan upaya pendidikan politik di Kabupaten Buleleng untuk terus meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Dan apa yang menjadi faktor penghambat partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penulis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik agar tingkat partisipasi terhadap masyarakat meningkat. Dan apa yang menjadi faktor kendala dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini secara teoritis (akademis) akan memberikan sumbangan terhadap keilmuan tentang politik terkait dengan peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat Buleleng.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini akan memberikan penjabaran kepada setiap struktur yang ada pada partai politik dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat mempunyai pendidikan politik sebagai landasan memilih wakil rakyat maupun pemimpin. Serta partai politik memberikan peran penting masyarakat dalam pemilihan umum demi menjaga jalannya demokrasi dengan baik.